

**Dokumentasi Wawancara dengan Ibu SITI SUPIAH, S.H., M.H.
selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Rabu, 14 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya, apabila kita merujuk kepada Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya BKD selalu berkoordinasi dengan BKN dengan cara mengirimkan staf untuk melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) berkoordinasi dengan BKN terkait prosedur administrative sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Iya, tentu saja dalam proses pengambilan data, BKN menunjuk pihak ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo untuk merekam data PNS, dimana PNS tersebut diharuskan melengkapi dan mengikuti prosedur atau persyaratan-persyaratan seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Sejauh ini implementasi yang telah kami lakukan telah mencapai 80% dari \pm 11.000 PNS yang ada di Kota Bandar Lampung sudah sekitar \pm 9000 PNS yang sudah memiliki KPE. Kendala yang kami hadapi adalah belum adanya jadwal yang pasti untuk pemfotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 ini, sehingga nasib KPE \pm 1500 PNS belum jelas untuk memiliki KPE tahun ini.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya sudah banyak sekali Sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, yang terbaru adalah mensosialisasikan KPE dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu upaya kami dengan

berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan yang notabene memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang banyak.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sejauh ini selama proses Implementasi KPE di Kota Bandar Lampung tentu saja peranan BKN sangat besar, ini terkait dengan arahan- arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan Otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, tinggal bagaimana kemauan dari Pucuk Pimpinan (Walikota), dalam hal ini kami selaku bawahan menunggu apa kebijakan dari Atasan.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Sejauh ini memang Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan Pihak Ke-3 terkait dengan pemfungsian KPE yaitu Fungsi Perbankan. Pada Tahun 2010 memang ada tawaran dari pihak Bank Lampung, BNI dan BRI untuk memfungsikan Layanan Perbankan KPE, tetapi itu terhenti semenjak adanya pergantian walikota dari Bapak Edi Sutrisno kepada Bapak Herman H.N. setelah itu BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Selama ini, pihak ke-3 memberikan respon positif terkait rencana kerjasama untuk memfungsikan layanan perbankan KPE, hal ini bisa dilihat dari Surat Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait layanan KPE.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Ya, dari beberapa fungsi KPE, berdasarkan Peraturan Kepada BKN Nomor 7 tahun 2008, sejauh ini pada Pemerintah Kota Bandar Lampung KPE sebagai pengganti Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yaitu KARIS, KARPEG, KARSU.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya, walaupun belum terlaksana sepenuhnya, minimal KPE sebagai Konversi dari Karpeg sudah berjalan.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Ya tentu saja sudah cukup, Badan Kepegawaian Daerah memiliki Sumber Daya Manusia (PNS) yang cakap dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD memiliki kemampuan dalam implementasi KPE. PNS BKD sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1 sampai S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya, selama ini Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung implementasi KPE dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 – 2014 ini, yang terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, kami sudah melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow pada tahun 2009 dan 2010 mensosialisasikan KPE keseluruh kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Yang pertama melakukan Rakor Kepegawaian yang dihadiri seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kedua bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Locket Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Rapat Koordinasi Kepegawaian Surat Edaran dan Locket Pelayanan Informasi KPE.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, yang kami rasakan adalah kurang profesionalnya pihak ke-3 atau rekanan yang di tunjuk BKN, dalam hal ini pihak PT. Sucofindo. Terbatasnya personal sehingga membuat proses pemfotoan KPE menjadi sedikit terhambat (Antrian Panjang).

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Kami BKD Kota Bandar Lampung hanya menyiapkan lokasi dan undangan kepada PNS untuk diambil datanya, terkait teknologi pihak BKN menunjuk pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja, Badan Kepegawaian Daerah membuka Loker Pelayanan KPE yang bisa di akses pada jam-jam kerja. PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bias memanfaatkannya.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, BKD membuka Loker Pelayanan Infomasi KPE.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya, sudah banyak PNS yang menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE ke Loket Pelayanan KPE.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya, sesuai dengan disposisi dari bapak Walikota Bandar Lampung, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (konversi) karpeg ke KPE.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya dalam waktu dekat ini BKD akan melakukan pemfotoan ulang bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya selama ini upaya yang kami lakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Sejauh ini PNS kota menyambut dan mendukung kebijakan ini, proses pemfotolan dihadiri banyak PNS dan PNS yang memiliki kendala KPE seperti belum memiliki KPE selalu menanyakan jadwal pemfotolan KPE.